

## Artikel

# Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Padang Tahun 2018

Aga Nanda Eko Putra<sup>1,\*</sup>, M. Fachri Adnan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [1204aga@gmail.com](mailto:1204aga@gmail.com)

## Abstract

This event will be based on research by the low level of community participation in the polling on the election of the Mayor of Padang from the year 2008 up to the year 2018. This research aims to clarify the significance of socio-economic status of relations to the level of political participation of the community in the election of Mayor and Deputy Mayor of Padang the year 2018. The methods used in this research is quantitative correlation with the technique of method of sampling using multi stage random sampling technique. The results of this research show that socioeconomic status where the level of education and income a person there is no relationship with the level of political participation of the community in the election of Mayor and Deputy Mayor of Padang the year 2018. While this type of work have a relationship with the level of political participation of the community in the election of Mayor and Deputy Mayor of Padang the year 2018. The conclusions of this research shows that there is no relationship between socio-economic status may level the level of political participation of the community in the election of the Mayor of Padang with the ANOVA test analysis results obtained the value of the correlation of 0.255. While the level of education obtained correlation value of 0.609, type of work with a value of 0.025 correlation and correlation of results obtained income level of 0.255.

Keywords: Socio-economic Status, education, employment, income, political participation.

## Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari sistem demokrasi yang di anut oleh negara Indonesia, dimana secara langsung rakyat dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum terbagi atas Pemilihan legislatif (Pileg), Pemilihan presiden (Pilpres), dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemilihan umum tersebut di laksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.

Pemilhan umum yang di lakukan secara langsung, menuntut partisipasi masyarakat

dalam memilih pasangan calon. Menurut Herbert Mc Closky (dalam Budiarto, 2013:367), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi tersebut dapat dilihat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang yang merupakan bagian dari Pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Adapun persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemberian Suara Pilkada Kota Padang Tahun 2008 sd 2018

No.	Tahun	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Menggunakan Hak Pilih	Persentase
1.	2008	541.473	309.486	57,16%
2.	2013 (Putaran 1)	561.189	323.594	57,66 %
3.	2014 (Putaran 2)	560.285	300.227	53,58%
4.	2018	535.265	341.281	63,76%

Sumber: KPU Kota Padang 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat partisipasi terendah masyarakat Kota Padang dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang setiap periodenya terjadi pada tahun 2014 dalam putaran 2 sebesar 53,58 %. Sedangkan tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 63,76 %. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut tingkat partisipasi pemilih mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, dan rata-rata persentase masyarakat Kota Padang dalam pemilihan tersebut menunjukkan partisipasi sebesar 58,04%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang dalam Pemilihan Walikota sangat rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara pada Pemilihan Walikota Padang tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal dan berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Adapun meluasnya

perubahan tersebut terhadap partisipasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Verba dan Nie (dalam Mujani, 2007:272-274) mengatakan bahwa sebagian besar partisipasi ditentukan oleh status sosial ekonomi.

Hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dijelaskan dalam temuan Conway (1985:19-24) pada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bagus umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi. kemudian hal ini dipertegas dalam penelitian Muhammad Yahya Arwiyah (2012:85-92 ) yang menemukan bahwa ternyata status pendidikan, pendapatan, dan perbedaan jenis pekerjaan (nonpetani dibandingkan dengan petani) berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

kabupaten Bandung dengan tingkat yang cukup. Namun dalam beberapa penelitian lainnya, seperti, Marlina Tarigan (2009) dan Faizil Aziz (2012) tidak menemukan adanya hubungan positif antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik. Artinya status sosial ekonomi tidak selalu memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas dan berdasarkan beberapa penelitian mengenai hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi politik, menjadi hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kota Padang dikarenakan masyarakat yang menggunakan hak pilih terdiri dari berbagai status sosial ekonomi yang berbeda-beda sehingga memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Oleh sebab itu, maka penulis dalam penelitian ini mengangkat judul “Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Padang tahun 2018”

Berangkat dari permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan signifikansi hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.
- b. Menjelaskan signifikansi hubungan jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.
- c. Menjelaskan signifikansi hubungan tingkat pendapatan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.
- d. Menjelaskan signifikansi hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

Ho<sub>1</sub> : Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Ho<sub>2</sub>: Tidak terdapat hubungan antara pendapatan dengan tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Ho<sub>3</sub>: Tidak terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Ho<sub>4</sub>: Tidak terdapat hubungan antara status social ekonomi (pendidikan, pekerjaan dan pendapatan) dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Ha<sub>1</sub>: Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Ha<sub>2</sub>: Terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Ha<sub>3</sub>: Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Ha<sub>4</sub>: Terdapat hubungan yang signifikan antara status social ekonomi (pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan) dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif korelasional merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada (Arikunto, 2010:4).

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yang menjadi populasi adalah masyarakat yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 dengan total pemilih sebanyak 535.265 jiwa.

Sedangkan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf signifikan 10 %

Sehingga:

$$n = \frac{535.265}{1 + 535.265(0.10)^2}$$

**n = 99,98**

Dari perhitungan rumus solvin diatas, di dapatkan jumlah sampel penelitian adalah **99,98**, sehingga dibulatkan menjadi **100** orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *multistage random sampling* yang merupakan teknik pengambilan

sampel secara acak dan bertahap dari populasi, biasanya berdasarkan wilayah. Jadi dalam satu populasi dapat dibagi-bagi dalam gugus/kelompok tingkat pertama, kemudian gugus-gugus/kelompok-kelompok tingkat pertama ini dapat pula dibagi dalam gugus-gugus/kelompok-kelompok tingkat kedua, dan gugus-gugus /kelompok-kelompok tingkat kedua masih dapat pula dibagi dalam gugus-gugus/kelompok-kelompok tingkat yang lebih lanjut. (Rianse,Usman dan Abdi, 2009:204).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket yang penulis sebarakan kepada sejumlah sampel dengan nilai jawaban responden di gunakan *skala likert* dengan kategori sebagai berikut:

**Tabel. 2** Klasifikasi Skala Likert

NO	Klasifikasi	Nilai	
		Positif	Negatif
1.	Sangat Setuju (SS)	4	1
2.	Setuju (S)	3	2
4.	Kurang Setuju (KS)	2	3
5.	Tidak Setuju (TS)	1	4

Sumber: Sugiyono, (2011)

Berdasarkan skala diatas dalam penelitian ini klasifikasi Sangat Setuju (SS) = Selalu, Klasifikasi Setuju (S) = Sering, klasifikasi Kurang Setuju (KS) = Pernah, dan Klasifikasi Tidak Setuju (TS) = Tidak Pernah.

Sebelum menyebarkan angket penelitian, angket terlebih dahulu di uji validitas dan reliabilitas , uji validitas dilakukan dengan bantuan *software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21*. Valid atau tidaknya pernyataan yang diuji dapat dilihat dari

*corrected item-total correlation* dengan berpedoman pada koefisien korelasi  $r_{tabel}$ . dengan kesimpulannya yaitu jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka item pernyataan dikatakan valid dan jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item pernyataan dikatakan tidak valid dengan ketentuan  $r_{tabel} = 0,361$  pada  $\alpha = 5\%$ .

Hasil dari uji validitas terhadap item-item pertanyaan yang valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2** Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilwako Padang 2018

No Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
2	0,490	0,361	Valid
3	0,800	0,361	Valid
4	0,173	0,361	Tidak Valid
5	0,710	0,361	Valid
6	0,687	0,361	Valid
7	0,719	0,361	Valid
8	0,341	0,361	Tidak Valid
9	0,727	0,361	Valid
10	0,575	0,361	Valid
11	0,775	0,361	Valid
12	0,787	0,361	Valid
13	0,386	0,361	Valid
14	0,626	0,361	Valid
15	0,673	0,361	Valid
16	0,564	0,361	Valid
17	0,249	0,361	Tidak Valid

Sumber: Hasil pengolahan uji coba dengan SPSS versi 21

Berdasarkan tabel diatas, dari 17 item pertanyaan uji coba angket, dapat dilihat bahwa nomor item pertanyaan 4, 8 dan 17 dinyatakan tidak valid. Sehingga hanya terdapat tiga belas butir pertanyaan yang dinyatakan valid dan pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak dimasukkan dalam angket pertanyaan dalam penelitian.

Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan *software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21*, dengan uji reliabilitas ditentukan dengan koefisien *croanbach's alpha*, dengan batas reliabilitas item angket ditetapkan sebesar 0,60 dalam penelitian ini.

Berikut ini hasil reliabilitas dari hasil uji coba angket terhadap 30 responden:

**Tabel. 3** Hasil Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,877	13

Dari hasil analisis reliabel terhadap uji coba angket yang telah diolah, diperoleh r alpha 0,877, sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dinyatakan reliabel yaitu r alpha > r yang ditetapkan. Adapun tingkatan reliabel angket ini

berdasarkan hasil uji coba tersebut adalah sangat reliabel.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis One-Way ANOVA dengan bantuan aplikasi SPSS versi 21, Sebelum dilakukan uji One Way ANOVA terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dengan *Kolmogorov Smirnov* menggunakan program SPSS versi 21. Uji normalitas merupakan suatu syarat sebelum melakukan analisis korelasi. Adapun pedoman dalam pengambilan keputusan uji normalitas adalah:

- a. Jika signifikan atau nilai probabilitas < 0,05 maka data berdistribusi secara tidak normal.
- b. Jika signifikan atau nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi secara normal.

Teknik analisis ANOVA satu jalur (*one-Way ANOVA*) digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel, yang merupakan salah satu teknik analisis *multivariate* yang berfungsi untuk melihat hubungan dengan cara membedakan rerata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya (Suryani, Hendri 2015 : 306).

Menurut Rostina Sundayana (2016:158), analisis varians adalah suatu teknik untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dua atau

lebih observasi dengan cara mengadakan perbandingan antara dua atau lebih rata-rata. Hasil variansi data dapat dilihat dari test homogenitas varians, jika hasil pengujian dengan *levene test* diperoleh nilai sig > 0,05 menandakan bahwa ada varian yang sama antara kedua variabel. Dengan demikian asumsi data dinyatakan memenuhi asumsi homogenitas varian.

Kemudian, setelah dilakukan uji homogenitas data, untuk melihat hubungan antara variabel X (Status sosial ekonomi) terhadap variabel Y (tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilwako Padang 2018), dapat dilihat dari *output* ANOVA jika nilai sig <  $\alpha$  (0,05) maka koefisien korelasi yang dihasilkan adalah signifikan dan terdapat perbedaan rata-rata variabel X terhadap variabel Y. (Rostina Sundayana, 2016:234).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan perhitungan menggunakan bantuan SPSS versi 21 diperoleh hasil uji normalitas data yang telah dilakukan terhadap 100 orang responden menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel tingkat partisipasi 0,390 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis uji korelasi.

### a. Hubungan tingkat pendidikan (X.1) dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilwako padang 2018 (Y)

Berdasarkan hasil dari uji One-Way ANOVA diperoleh nilai sig 0,609 > 0,05. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai sig >  $\alpha$  menandakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dikota Padang dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota tingkat partisipasi masyarakatnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sehingga tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wolfinger (dalam Efriza, 2012:543) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. Dalam penelitian lain, tingkat pendidikan tidak ditemukan

berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian Andriyus (2013:29-30) bahwa tingkat pendidikan masyarakat atau seseorang tidak berhubungan atau kurang berpengaruh terhadap partisipasi politiknya pada pemilihan umum legislative 2009 di Kecamatan Singingi Hilir. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Aang Nofitra (2016:13), hasil penelitian di peroleh bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pilpres tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pendidikan tidak menjamin seseorang dalam berpartisipasi pada kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil penelitian yang relevan, dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan hipotesis penelitian tidak terdapat hubungan yang signifikan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 atau dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang belum tentu semakin tinggi tingkat partisipasi, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang belum tentu semakin rendah tingkat partisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat partisipasi seseorang tentunya tidak selalu berhubungan atau dipengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya pendidikan, namun terdapat faktor lain yang mempengaruhinya tingkat partisipasi politik tersebut seperti kesadaran masyarakat, pemahaman terhadap kandidat, perilaku memilih, dan lain sebagainya (Andriyus, 2013:29-30).

### b. Hubungan Jenis Pekerjaan (X.2) Dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilwako Padang 2018 (Y)

Berdasarkan hasil dari uji One-Way ANOVA dihasilkan nilai sig 0,025. Karena nilai sig = 0,025 <  $\alpha$  = 0,05 maka koefisien korelasi yang dihasilkan signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan jenis pekerjaan dengan partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018. Sehingga juga terdapat perbedaan rata-rata tingkat partisipasi politik terhadap jenis pekerjaan tertentu. Jenis

pekerjaan yang paling tinggi berpartisipasi dalam Pilwako Padang 2018 berdasarkan penghitungan adalah jenis pekerjaan petani dengan jumlah rata-rata *mean* sebesar 0,41, wirasaha sebesar 0,254, lainnya - 0,118, pelajar/mahasiswa sebesar -0,121 dan terendah yaitu PNS sebesar -0,425. Hasil penelitian ini membuktikan teori dari Wolfinger (dalam Efriza, 2012:543) yang menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Sehingga pada penelitian ini ditemukan jenis pekerjaan petani lebih berpartisipasi dari PNS.

Keaktifan petani dalam berpartisipasi memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 disebabkan oleh adanya kedekatan emosional dengan kandidat pasangan calon tertentu. Hal ini berdampak terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat, seperti ikut dalam memberikan suara, ikut berkampanye mendukung pasangan calon, membagikan stiker, pamphlet, brosur atau pun membentuk dan bergabung dengan kelompok-kelompok pendukung lainnya berdasarkan angket yang dibagikan kepada responden. Gejala ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Malisa Ladini (2016:96-97) dengan hasil yaitu petani di Kelurahan Pringapus yang aktif dalam berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 dikarenakan memiliki kedekatan khusus dengan partai politik dan pasangan calon yang memperdulikan nasib para petani. Kebaruan dari penelitian ini adalah jenis pekerjaan tertentu memiliki hubungan dengan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018, dimana jenis pekerjaan petani lebih berpartisipasi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya.

Sedangkan rendahnya PNS yang berpartisipasi dalam Pilwako Padang tahun 2018 disebabkan oleh regulasi. PNS harus menjaga netralitas dalam pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sehingga PNS tidak boleh mendukung secara terang-terangan pasangan calon tertentu, ikut berkampanye, membagikan phamplet, stiker atau memasang spanduk pasangan calon tertentu.

### c. Hubungan Tingkat Pendapatan (X.3) Dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilwako Padang 2018 (Y)

Hasil uji ANOVA menunjukkan sig 0,104. Karena nilai sig. = 0,104 >  $\alpha$  = 0,05 maka koefisien korelasi yang dihasilkan tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan tingkat pendapatan dengan partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018. Berdasarkan teori Alexander Abe (2001: 110), lipset (dalam Fachri, 2012:39) dan Wolfinger (dalam Efriza, 2012:543) yang menyatakan partisipasi di pengaruhi salah satunya oleh pendapatan, dimana pendapatan yang tinggi memudahkan seseorang dalam menanggung beban finansial dan cenderung untuk berpartisipasi di bandingkan dengan seseorang dengan tingkat pendapatan rendah akan cenderung untuk tidak berpartisipasi, namun pada hasil penelitian ini teori tersebut tidak berlaku di Kota Padang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Pendapatan tidak selalu berhubungan dengan tingkat partisipasi politik, berdasarkan hasil penelitian ini dan berdasarkan penelitian oleh KPU Sumatera Barat (2015:42) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang tidak mempengaruhi partisipasi dalam pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Dharmasraya dengan hasil analisis yang diperoleh tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan partisipasi politik masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berpendapatan tinggi belum tentu tingkat partisipasi tinggi dan seseorang yang memiliki pendapatan rendah belum tentu juga akan rendah tingkat partisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Sehingga tingkat pendapatan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

### d. Hubungan Status Sosial Ekonomi (X) Dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilwako Padang 2018 (Y)

Hasil uji ANOVA pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikan 0,255. Karena nilai sig. = 0,255 >  $\alpha$  = 0,05 maka koefisien korelasi yang dihasilkan tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018. Hasil penelitian ini memperkuat

serta membuktikan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya seperti, Marlina Tarigan (2009) dan Faizil Aziz (2012) tidak menemukan adanya hubungan positif antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik.

Artinya status sosial ekonomi tidak selalu memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018, masyarakat dengan status sosial ekonomi tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin akan berpartisipasi tinggi, kemudian masyarakat yang berpendidikan rendah tidak menjamin tingkat partisipasi juga rendah. Sedangkan status sosial ekonomi tingkat pendapatan, dimana semakin tinggi pendapatan seseorang belum tentu semakin tinggi tingkat partisipasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan seseorang tidak menjamin akan berpartisipasi rendah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status sosial ekonomi tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi, dimana tinggi rendahnya pendidikan dan pendapatan tidak ada hubungan dengan tingkat partisipasi seseorang dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan hubungan antara status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 sebagai berikut:

*Pertama*, tingkat pendidikan (X.1) tidak ada hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 (Y). Hal ini berarti bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 tingkat partisipasi masyarakat tidak berhubungan dengan tinggi atau rendahnya pendidikan seseorang atau seseorang yang berpendidikan tinggi belum tentu berpartisipasi tinggi dan seseorang yang berpendidikan rendah belum tentu rendah pula tingkat partisipasi dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018.

*Kedua*, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan (X.2) dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 (Y). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi tertinggi yaitu petani, wirausaha, pekerjaan lainnya, dan pelajar/mahasiswa sedangkan tingkat partisipasi terendah yaitu jenis pekerjaan PNS. Hal ini berarti jenis-jenis pekerjaan tertentu yang ditekuni oleh masyarakat memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

*Ketiga*, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan (X.3) tidak ada hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi politik (Y). Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya pendapatan seseorang tidak ada hubungannya dengan tingkat partisipasi seseorang atau seseorang yang berpendapatan tinggi belum tentu tingkat partisipasi tinggi dan seseorang yang memiliki pendapatan rendah belum tentu juga akan rendah tingkat partisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

*Keempat*, secara simultan bahwa tingkat pendidikan tidak ada hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi politik, dan tingkat pendapatan juga tidak ada hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi politik sedangkan jenis pekerjaan ada hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi politik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara status sosial ekonomi (X) dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 (Y) menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. Hasil dari penelitian ini berarti bahwa status sosial ekonomi seseorang tidak ada hubungannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki saran yang berkenaan dengan hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.



*Pertama*, kepada penyelenggara pemilu diharapkan mampu memberikan pemahaman politik dan menumbuhkan kesadaran masyarakat disemua jenis pekerjaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode selanjutnya.

*Kedua*, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang untuk periode selanjutnya harus ditingkatkan lagi tidak hanya dilihat dari status sosial ekonomi namun dari berbagai aspek yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik tersebut.

*Ketiga*, bagi peneliti lainnya agar tidak hanya melihat hubungan partisipasi politik dengan status sosial ekonomi, namun dapat dikembangkan dari berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik tersebut.

### Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan teori oleh Wolfinger (dalam Efriza, 2012:543) Lipset dan Deutsch (dalam Miriam Budiarto, 2008:9), Rafael Raga Maran (1997:156), dan beberapa temuan baik Taufik Hidayat (2016 : 562-576), Asrobi Panuntun (2015: 743-753), Andriyus (2013 : 30) menyatakan adanya hubungan antara status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Namun, pada penelitian ini menemukan hasil yang tidak sejalan dengan teori dan dengan beberapa temuan penelitian yang relevan, dikarenakan dalam penelitian ini memiliki pertimbangan bahwa karakteristik responden yang penulis teliti tidak merata diantara karakteristik responden lainnya yaitu diantaranya:

*Pertama*, tingkat pendidikan responden paling tinggi yaitu perguruan tinggi sebanyak 32 orang atau sebesar 32 % , pendidikan menengah sebanyak 62 orang atau sebesar 62 % dan pendidikan dasar sebanyak 6 orang atau 6 %, sehingga karakteristik responden ini mempengaruhi hasil dari penelitian yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan tingkat partisipasi.

*Kedua*, jenis pekerjaan yang diisi oleh responden pekerjaan lainnya sebesar 36 %, Wirausaha 33 %, PNS 21 %, Pelajar/Mahasiswa 6 % dan Petani 4 %, sehingga menghasilkan penelitian bahwa jenis pekerjaan petani lebih

berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.

*Ketiga*, responden dengan dengan pendapatan paling tinggi > Rp. 3. 500. 000 sebesar 17 %, pendapatan Rp. 2.500.000 – 3. 500.000 sebesar 36 %, pendapatan Rp. 1.500.000 – 2.500.000 sebesar 28 %, dan pendapatan ≤ Rp. 1.500.000. sehingga menimbulkan hasil penelitian ini dimana pendapatan tidak selalu berhubungan dengan tingkat partisipasi politik.

### Daftar Pustaka

- Abe, A. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Adnan, M Fachri. 2012. *Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang: UNP Press.
- Andriyus. 2013. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”. *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 26-27.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arwiyah, Muhammad Y. 2012. “Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik”. *eJurnal Mimbar*.Vol XXVIII, NO. 1. HLM 85-92.
- Aziz, Faizil. 2012. *Partisipasi Politik Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010*. Polokda, Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT GramediaPustaka Utama.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung. Alfabeta.
- Hidayat, Taufik. 2016. “Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”. *eJurnal Pemerintahan Integratif*. Vol 4(4). Hlm 562-567.
- Ladini, Malisa. 2015. *Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus (Skripsi)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya Rianse, Usman dan Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV Alfabeta
- M. Margaret, Conway. 1985. *Political Participation in the United States*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Nofitra, Aang. 2016. “Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2014”. *JOM FISIP*. Vol. 3 No. 2. Hlm 5-6.
- Panuntun,Asrobi. 2015. “Hubungan pendidikan terhadap partisipasi politik Masyarakat dalam pemilu presiden 2014 di kelurahanBaqa kecamatan

- samarinda seberang kota samarinda". *eJournal Administrasi Negara*. Vol 3 . No 2. Hlm 743-753.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : AlfabetaSundayana, Rostina. 2016. *Statistika Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Marlina. 2009. *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pilkada 2008*.

- <http://www.eprint.undip.ac.id/download> 18  
Desember 2018:10.30 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945